



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) 2022

PENGADILAN NEGERI PARIGI KELAS II

JL SUNGAI PAKABATA KAB.PARIGI MOUTONG SULAWESI TENGAH
www.pn-parigi.go.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagaimana dimaksud pada pasal 1 Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, disebutkan bahwa :

- 1) Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik;
- 2) Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar;
- 3) Negara Indonesia adalah negara hukum yang berbentuk Republik didasarkan bukan pada kekuasaan tapi didasarkan pada hukum;

Pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Ayat (2) menyatakan bahwa Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya. Sesuai dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, pada pasal 1 angka 1 dijelaskan bahwa Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. Sedangkan pada pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009, menyatakan bahwa Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Tahun 2019 adalah tahun terakhir dari rencana strategis (renstra) Pengadilan Negeri Parigi 2015 – 2019 dan rancangan rencana strategis Tahun 2020 – 2024 merupakan tahap ketiga dari rencana jangka menengah yang dicanangkan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam “Blue Print (Cetak Biru) 2010-2035”.

Perencanaan jangka menengah Pengadilan Negeri Parigi yang berisi tentang gambaran sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun oleh Pengadilan Negeri Parigi, beserta strategi yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran sesuai dengan tugas, fungsi dan peran yang diamanahkan.

Penyusunan Renstra Pengadilan Negeri Parigi mengacu pada “Blue Print (Cetak Biru) dan Renstra Peradilan Umum 2010-2035” telah menjadi kebijakan dan tekad segenap unsur pimpinan Mahkamah Agung, pimpinan Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama seluruh Indonesia dari empat lingkungan peradilan.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Negeri Parigi diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005 – 2025, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2020 – 2024.


B. Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Kedudukan Pengadilan Negeri Parigi secara organisatoris, administratif dan finansial serta teknis yustisial berada di bawah pembinaan dan pengawasan Mahkamah Agung, sesuai ketentuan pasal 13 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman Jo. KEPPRES Nomor 21 Tahun 2004 Tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi, dan Finansial di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung serta PERMA Nomor 7 tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;

Pengadilan Negeri Parigi Kelas II merupakan pengadilan tingkat pertama yang berada di bawah Mahkamah Agung RI sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka dalam menyelenggarakan peradilan guna menegakan Hukum dan Keadilan. Pengadilan Negeri Parigi Kelas II sebagai kawal depan (*voorj post*) Mahkamah Agung yang bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama dengan wilayah hukum meliputi Kabupaten Parigi Moutong.

Sejalan dengan makin tumbuh dan berkembangnya kehidupan masyarakat lembaga peradilan dituntut memberikan pelayanan yang baik, dengan berlakunya Undang-Undang keterbukaan publik, hal ini menuntut agar lembaga peradilan merubah paradigma yang ada menjadi pelayan masyarakat, tentunya tidak terlepas dari upaya reformasi birokrasi. Adapun tugas pokok dan fungsi aparat Pengadilan Negeri Parigi Kelas II adalah sebagai berikut:

1. Ketua dan Wakil Ketua

-  Ketua mengatur pembagian tugas para Hakim, pembagian berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara yang diajukan kepada Majelis Hakim untuk diselesaikan.

- ✚ Mengadakan pengawasan dan pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Pejabat Struktural dan Fungsional, serta perangkat administrasi peradilan di daerah hukumnya.
- ✚ Menjaga agar penyelenggaraan peradilan terselenggara dengan wajar dan seksama.

2. Majelis Hakim

- ✚ Melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman di daerah hukumnya (menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan semua perkara yang diajukan kepadanya).

3. Panitera

- ✚ Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dalam pemberian dukungan di bidang teknis;
- ✚ Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara perdata;
- ✚ Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara pidana;
- ✚ Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara khusus;
- ✚ Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara, penyajian data perkara, dan transparansi perkara;
- ✚ Pelaksanaan administrasi keuangan yang berasal dari APBN dalam program teknis dan keuangan perkara yang ditetapkan berdasarkan peraturan dan perundangundangan, minutasi, evaluasi dan administrasi Kepaniteraan;
- ✚ Pelaksanaan mediasi;
- ✚ Pembinaan teknis kepaniteraan dan kejurusitaan; dan
- ✚ Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Negeri.

4. Panitera Muda Perdata

- ✚ Pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara perdata;
- ✚ Pelaksanaan registrasi perkara gugatan dan permohonan;
- ✚ Pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan;
- ✚ Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi;
- ✚ Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak hadir;

- ✚ Pelaksanaan penyampaian pemberitahuan putusan tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali kepada para pihak;
- ✚ Pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali;
- ✚ Pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi putusan kepada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung;
- ✚ Pelaksanaan penerimaan konsinyasi;
- ✚ Pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi;
- ✚ Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap;
- ✚ Pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum;
- ✚ Pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan; dan
- ✚ Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

5. Panitera Muda Pidana

- ✚ Pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara pidana;
- ✚ Pelaksanaan registrasi perkara pidana;
- ✚ Pelaksanaan penerimaan permohonan praperadilan dan pemberitahuan kepada termohon;
- ✚ Pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan;
- ✚ Pelaksanaan penghitungan, penyiapan dan pengiriman penetapan penahanan, perpanjangan penahanan dan penangguhan penahanan;
- ✚ Pelaksanaan penerimaan permohonan ijin penggeledahan dan ijin penyitaan dari penyidik;
- ✚ Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi;
- ✚ Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak hadir;
- ✚ Pelaksanaan penyampaian pemberitahuan putusan tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali kepada para pihak;
- ✚ Pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali;

- ✚ Pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi putusan kepada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung;
- ✚ Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;
- ✚ Pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi;
- ✚ Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap;
- ✚ Pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum;
- ✚ Pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan; dan
- ✚ Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

6. Panitera Muda Hukum

- ✚ Pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan dan penyajian data perkara;
- ✚ Pelaksanaan penyajian statistik perkara;
- ✚ Pelaksanaan penyusunan dan pengiriman pelaporan perkara;
- ✚ Pelaksanaan penataan, penyimpanan dan pemeliharaan arsip perkara;
- ✚ Pelaksanaan kerja sama dengan Arsip Daerah untuk penitipan berkas perkara,
- ✚ Pelaksanaan penyiapan, pengelolaan dan penyajian bahan-bahan yang berkaitan dengan transparansi perkara.
- ✚ Pelaksanaan penghimpunan pengaduan dari masyarakat, hubungan masyarakat dan;
- ✚ Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

7. Panitera Pengganti

- ✚ Membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya persidangan.
- ✚ Membuat berita acara persidangan
- ✚ Membantu Hakim dalam :
- ✚ Membuat penetapan hari sidang
- ✚ Membuat penetapan penahanan
- ✚ Mengetik putusan
- ✚ Melaporkan kepada Panitera Muda bersangkutan berkenaan dengan penundaan hari sidang, perkara yang sudah putus dan amar putusannya.
- ✚ Menyerahkan berkas perkara kepada Panitera Muda bersangkutan bila telah selesai diminutasi.

8. Jurusita/Jurusita Pengganti

- ✚ Melaksanakan semua perintah yang diberikan oleh Ketua Pengadilan, Majelis Hakim dan Panitera
- ✚ Melaksanakan pemanggilan atas perintah Ketua Pengadilan atau atas perintah Hakim.
- ✚ Menyampaikan pengumuman-pengumuman, teguran-teguran dan pemberitahuan Putusan Pengadilan menurut cara-cara berdasarkan ketentuan Undang-undang.
- ✚ Melakukan penyitaan atas perintah Ketua Pengadilan dan dengan teliti melihat lokasi batas-batas tanah yang disita beserta surat-surat yang sah apabila menyita tanah.
- ✚ Membuat berita acara penyitaan yang salinan resminya diserahkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan, antara lain kepada BPN setempat bila terjadi penyitaan sebidang tanah.

9. Sekretaris :

- ✚ Penyiapan bahan pelaksanaan urusan perencanaan program dan anggaran;
- ✚ Pelaksanaan urusan kepegawaian;
- ✚ Pelaksanaan urusan keuangan;
- ✚ Penyiapan bahan pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana;
- ✚ Pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi dan statistik;
- ✚ Pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolanan, hubungan masyarakat, dan perpustakaan; dan
- ✚ Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan di lingkungan Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas II.

10. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan

Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan perencanaan, program, dan anggaran, pengelolaan teknologi informasi, dan statistik, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan.

11. Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan

Subbagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolanan, hubungan masyarakat, perpustakaan, serta pengelolaan keuangan.

12. Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tatalaksana Subbagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan kepegawaian, penataan organisasi dan tata laksana.

C. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Parigi dibuat dengan berdasarkan pada PERMA No. 2 tahun 2020 yang merupakan perubahan ketiga PERMA No.07 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan. Struktur organisasi Pengadilan Negeri Parigi Kelas II dapat digambarkan sebagai berikut :

Bagan Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Parigi



1. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia (pegawai) yang ada pada Pengadilan Negeri Parigi Kelas II sebanyak 33 (tiga puluh tujuh) orang

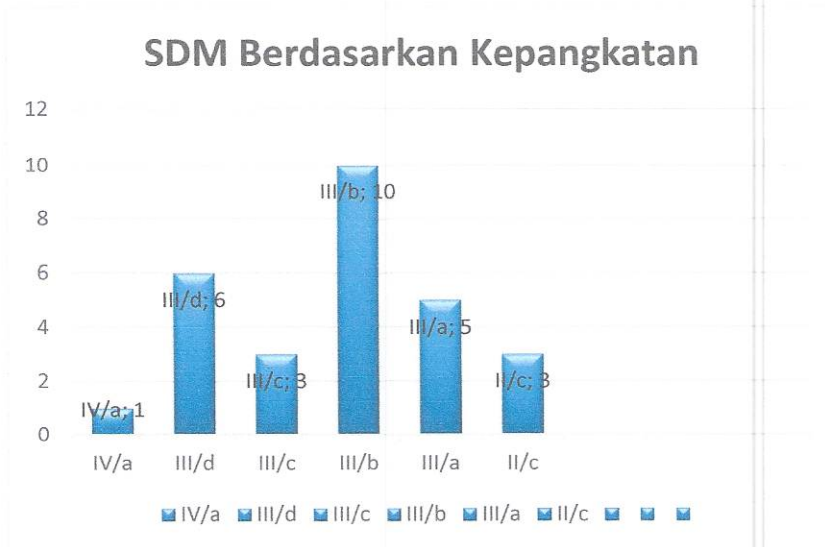
a. Sumber Daya Manusia Berdasarkan Jabatan

• Ketua	: 1 orang
• Wakil Ketua	: - orang
• Hakim	: 6 orang
• Panitera	: 1 orang
• Sekretaris	: 1 orang
• Panitera Muda	: 3 orang
• Panitera Pengganti	: 2 orang
• Kepala Sub Bagian	: 3 orang
• Jurusita	: 1 orang
• Jurusita Pengganti	: 1 orang
• Staf (pelaksana)	: 6 orang
• Fungsional Prakom	: 2 orang
• Fungsional Arsiparis	: 1 orang
• Tenaga Honorer	: 9 orang

b. Sumber Daya Manusia Berdasarkan Kepangkatan/Golongan Ruang

• Pembina Utama Muda (IV/b)	: - orang
• Pembina (IV/a)	: 1 orang
• Penata Tk. I (III/d)	: 6 orang
• Penata (III/c)	: 3 orang
• Penata Muda Tk. I (III/b)	: 10 orang
• Penata Muda (III/a)	: 5 Orang
• Pengatur Tk. I (II/d)	: - Orang
• Pengatur (II/c)	: 3 Orang
• Pengatur Muda Tk. I, (II/b)	: - Orang
• Pengatur Muda II a	: - Orang

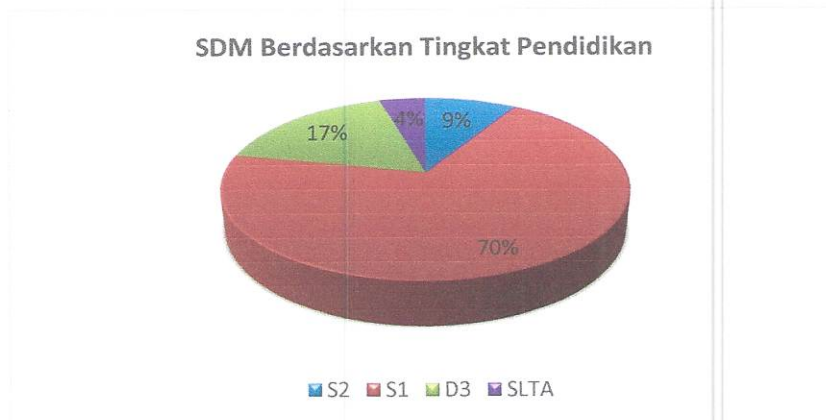
Grafik 1. Komposisi SDM Pengadilan Negeri Kelas Parigi Berdasarkan Kepangkatan dan Golongan Ruang



c. Sumber Daya Manusia Berdasarkan Tingkat Pendidikan

- Magister (S2) : 2 orang
- Sarjana (S1) : 16 orang
- Diploma (D3) : 4 orang
- SLTA : 1 orang

Grafik 2. Komposisi SDM Pengadilan Negeri Parigi Berdasarkan Tingkat Pendidikan



D. Aspek Strategis Dan Permasalahan Utama (Strategic Issued)

Dalam rangka melaksanakan Tugas pokok dan fungsinya mengadili (judicial power), fungsi pembinaan, fungsi pengawasan, fungsi nasehat, fungsi administratif, Pengadilan Negeri Parigi sebagai lembaga peradilan di lingkungan Peradilan Umum di bawah Mahkamah Agung RI memiliki peran strategis untuk berkontribusi dalam mencapai tujuan pembangunan nasional di bidang hukum.

Mengacu pada Cetak Biru 2010-2035 Mahkamah Agung RI dan Rencana Strategis 2020-2024, Pengadilan Negeri Parigi sedang dan akan terus melakukan berbagai langkah kebijakan strategis guna mewujudkan visi dan misi serta tujuan organisasi. Pelaksanaan kebijakan tersebut telah memberikan banyak capaian dan kemajuan, Namun, di samping berbagai kemajuan yang telah dicapai Pengadilan Negeri Parigi masih dihadapkan pada beberapa kondisi obyektif yang harus diselesaikan untuk meningkatkan kinerja peradilan.

Untuk mempermudah identifikasi masalah, dilakukan pemetaan analisa kondisi strategis Pengadilan Negeri Parigi. Analisa kondisi strategis sangat signifikan dalam menentukan perencanaan maupun pencapaian sasaran strategis. Analisis kondisi lingkungan internal memiliki dua sisi, sisi pertama yaitu kondisi internal Pengadilan Negeri Parigi yang memiliki kekuatan atau keunggulan. Sisi kedua merupakan kondisi sebaliknya, yaitu kondisi internal yang memiliki permasalahan (kekurangan/kelemahan). Kedua sisi tersebut merupakan kajian dalam menetapkan faktor kunci keberhasilan.

1. Kekuatan (*Strength*)

Kekuatan Pengadilan Negeri Parigi mencakup hal-hal yang memang sudah diatur dalam peraturan/perundang-undangan sampai dengan hal-hal yang dikembangkan kemudian, mencakup:

- a. Merupakan provost (kawal depan) di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Parigi yang mencakup wilayah Kabupaten Parigi moutong.
- b. Pengadilan Negeri Parigi merupakan unsur Forkopimda dan memiliki hubungan baik dengan pemerintah Daerah.
- c. Merupakan pengambil keputusan dalam pertimbangan karir (promosi dan mutasi) pegawai Pengadilan Negeri Parigi.
- d. Adanya undang undang/Keppres yang mengatur kewenangan Pengadilan Negeri selaku pemberi keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum kepada lembaga kenegaraan di Wilayah Hukumnya, apabila diminta.

- e. Bersifat independen, lepas dari pengaruh lembaga lain.
- f. Pengadilan Negeri Parigi Kelas II di Tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 menjadi salah satu Pengadilan Negeri Kelas II yang mendapat penurunan dari nilai **A Excellent** menjadi Nilai **B** yang disebabkan oleh kesalahan penginputan administrasi pada Aplikasi SIPP sehingga pada tahun 2022 dapat meraih Kembali nilai **A Excellent** dari Badilum sehingga dapat menunjang pencapaian Visi dan Misi Pengadilan Negeri Parigi Kelas II.
- g. Dukungan teknologi informasi yang dikembangkan oleh Mahkamah Agung guna mewujudkan peradilan modern berbasis IT.

2. Kelemahan (*Weakness*)

Kelemahan-kelemahan yang ada di Pengadilan Negeri Parigi dirinci dalam beberpa aspek:

- a. Aspek Proses Peradilan
 - Penanganan Perkara yang masih mengalami keterlambatan disebabkan antara lain karena Jumlah Majelis Hakim yang kurang sementara jumlah perkara masuk cukup tinggi.
 - Telah memiliki mekanisme evaluasi yang dapat mengukur kepuasan masyarakat pencari keadilan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Parigi Kelas II tetapi belum terlaksana dengan baik. (BELUM DI TINDAK LANJUT DENGAN SEMPURNA)
 - Masih adanya sorotan masyarakat terhadap kinerja Badan Peradilan pada umumnya dan Pengadilan Negeri Parigi Kelas II pada khususnya dalam penegakan hukum dan keadilan. (DALAM PENYELESAIAN PERKARA SECARA ONLINE)
- b. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan
 - Pengadilan Negeri Parigi belum mempunyai kewenangan untuk merekrut pegawai sendiri sesuai kebutuhan Pengadilan.
 - Rekrutmen PNS yang diterima belum sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kerja yang dibutuhkan di Pengadilan Negeri Parigi.
 - Jumlah Pegawai yang ada di Pengadilan Negeri Parigi masih kurang sehingga menyebabkan para pegawai harus melakukan rangkap tugas
- c. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan
 - Belum maksimalnya Implementasi manajemen perkara berbasis teknologi informasi dalam hal ini implementasi Aplikasi Sistem Peneleusuran Perkara (SIPP) oleh para pegawai yang terkait.
- d. Aspek Sarana dan Prasarana

- Anggaran yang diterima Pengadilan Negeri Parigi dari pusat belum sesuai dengan kebutuhan dan rencana yang diajukan.

3. Peluang (*Opportunities*)

Berikut adalah peluang-peluang yang dimiliki Pengadilan Negeri Parigi untuk melakukan perbaikan ditinjau dari beberapa aspek :

a. Aspek Proses Peradilan

- Adanya website resmi Pengadilan Negeri Parigi dan beberapa Aplikasi pendukung yang memberikan informasi kepada masyarakat tentang informasi penanganan perkara dan alur proses berperkara.
- Adanya Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Pengadilan Negeri Parigi yang memudahkan masyarakat untuk memperoleh informasi dan layanan peradilan secara cepat dan mudah.

b. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

- Meningkatnya tunjangan kinerja/ remunerasi sebagai motivasi dalam peningkatan kinerja.
- Adanya sosialisasi, bimbingan teknis, pelatihan yang dilaksanakan Pengadilan Negeri Parigi maupun Mahkamah Agung dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia.

c. Aspek Pengawasan dan Pembinaan

- Adanya kegiatan pengawasan yang dilaksanakan secara berkala baik lingkup internal maupun eksternal.

d. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan

- Dukungan dan koordinasi yang baik antar Pengadilan Negeri di wilayah hukum Pengadilan Negeri Parigi.

e. Aspek Sarana dan Prasarana

- Tersedianya sarana publik guna memberikan kenyamanan kepada masyarakat pengguna layanan pengadilan diantaranya, tersedianya ruangan laktasi, ruang tamu dan tunggu terbuka, serta area merokok bagi pengunjung.
- Tersedianya fasilitas Teknologi Informasi di Pengadilan Negeri Parigi berupa akses internet dan website resmi Pengadilan Negeri Parigi, sehingga memudahkan Para pencari keadilan dan pengguna layanan peradilan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan.
- Tersedianya aplikasi penunjang dalam manajemen perkara yang dikembangkan oleh Mahkamah Agung yang memberikan kemudahan dalam pemberian layanan kepada masyarakat.

4. Tantangan yang dihadapi (*Threats*)

Berikut adalah tantangan-tantangan di Pengadilan Negeri Parigi yang akan dihadapi dan harus dipikirkan cara terbaik untuk tetap dapat melakukan perbaikan sebagaimana yang diharapkan.

a. Aspek Proses Peradilan

- Luas wilayah hukum Pengadilan Negeri Parigi yang cukup luas meliputi 3 kabupaten yakni Kabupaten Banggai, Kabupaten Banggai Kepulauan, Kabupaten Banggai Laut. Serta dibatasi oleh batas-batas alam seperti lautan akan berdampak pada penentuan Biaya proses perkara bagi masyarakat.

b. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

- Tuntutan pekerjaan yang semakin meningkat tidak diimbangi dengan ketersediaan aparatur Peradilan yang memiliki kompetensi khususnya dibidang teknologi informasi.
- Sumber daya manusia pada Pengadilan Negeri Parigi masih kurang sehingga ada pegawai yang rangkap jabatan yang mengakibatkan penurunan kualitas kinerja.

c. Aspek Pengawasan dan Pembinaan

- Belum maksimalnya penerapan sistem reward & punishment untuk mengontrol kinerja aparat peradilan.

d. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan

- Letak Pengadilan Negeri Parigi yang cukup jauh di daerah, sehingga pengiriman administrasi untuk perkara banding ke Pengadilan Negeri Parigi membutuhkan waktu lebih lama.
- Jumlah perkara yang masuk terus meningkat dari tahun ke tahun yang tidak diimbangi dengan penambahan jumlah Tenaga Fungsional Panitera Pengganti di antaranya menyebabkan keterlambatan dalam minutasasi perkara.

e. Aspek Sarana dan Prasarana

- Anggaran yang diberikan oleh tingkat pusat untuk pengadaan sarana dan prasarana masih kurang dibandingkan dengan kebutuhan dan usulan yang diajukan sehingga beberapa sarana prasarana penunjang operasional belum terpenuhi.

Dalam upaya mewujudkan tata pemerintahan yang baik, terdapat isu yang masih memerlukan perhatian terkait dengan kondisi penyelenggaraan pemerintahan yang belum sepenuhnya mencerminkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih, bebas

korupsi, kolusi, dan nepotisme. Selain itu, kepercayaan publik kepada pemerintah juga merupakan aspek lain yang harus ditingkatkan. Salah satu peran yang dapat dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Parigi dengan hal ini adalah melalui peningkatan kualitas pelayanan publik, perbaikan penerapan fungsi-fungsi manajemen secara benar, mulai dari perencanaan kinerja hingga kepada evaluasi kinerja, serta pengembangan nilai-nilai akuntabilitas dalam upaya mewujudkan tata kelola pengadilan yang transparan dan akuntabel.

e. Sistematika Penyajian Lkjiip Tahun 2022

Pada dasarnya Laporan Kinerja ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Parigi selama Tahun 2022. Capaian kinerja (performance results) tersebut merupakan perbandingan antara realisasi kinerja dengan target kinerja yang telah dituangkan dalam Penetapan Kinerja (performance agreement), maka penetapan kinerja yang telah ditetapkan di awal tahun 2022 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi pada tahun 2022.

Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (performance gap) bagi perbaikan kinerja di masa datang. Untuk mewujudkan hal yang dimaksud, sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjiIP) Pengadilan Negeri Parigi disusun sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Pada Bab ini menjelaskan secara singkat latar belakang, kedudukan, tugas pokok dan fungsi serta struktur organisasi.

Bab II Perencanaan Kinerja

Pada Bab ini menguraikan secara ringkas rencana strategis Pengadilan Negeri Parigi Tahun 2020-2024 dan Penetapan Kinerja 2022. Dalam perencanaan kinerja dirumuskan sasaran-sasaran strategis yang akan dicapai, begitu juga indikator keberhasilan pencapaiannya dengan memperhatikan berbagai arahan kebijakan dan strategi nasional serta arah kebijakan dan strategi Pengadilan Negeri Parigi.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Menjelaskan Capaian Pengukuran kinerja Organisasi (Perbandingan antara target dan realisasi kinerja), serta Realisasi Anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja.

Bab IV Penutup

Menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Negeri Parigi Kelas II Tahun 2022, dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa datang.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

a. Rencana Strategis

Untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolak ukur kinerja dilingkungan Pengadilan Negeri Parigi, maka ditetapkanlah Rencana Strategis Pengadilan Negeri Parigi tahun 2020 – 2024. Rencana Strategis Pengadilan Negeri Parigi Kelas II Tahun 2020-2024 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan, pengkajian, pengelolaan terhadap sistem, kebijakan dan peraturan perundang-undangan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Parigi Kelas II yang merupakan dokumen rencana taktis strategik dimaksudkan sebagai pedoman dalam melaksanakan program / kegiatan Pengadilan Negeri Kelas II Parigi dalam kurun waktu tahun 2020-2024, dan tujuannya adalah memberikan arah dan sasaran yang ingin dicapai dalam melaksanakan tugas dan fungsi Pengadilan Negeri Kelas II Pengadilan Negeri Parigi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan selanjutnya akan dijabarkan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dalam kaitannya dengan kebijakan anggaran. Kemudian setelah DIPA disahkan maka disusunlah skala prioritas dari Rencana Kinerja Tahunan menjadi Penetapan Kinerja (PK). Renstra digunakan untuk menilai kinerja Pengadilan Negeri Parigi Kelas II dalam upaya memenuhi target tercapainya Tugas Pokok dan Fungsi yang telah ditetapkan.

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Parigi Kelas II Tahun 2020-2024 disusun berdasarkan kondisi lingkungan strategis Pengadilan Negeri Parigi yang telah diuraikan dalam Visi Mahkamah Agung. Selain itu Rencana Strategis Pengadilan Negeri Parigi Kelas II didasarkan atas Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor :1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.

Visi dimaksud dijabarkan ke dalam Misi yang kemudian melahirkan strategi kegiatan. Dalam rangka perumusan kebijakan kegiatan, strategi tersebut dikaitkan dengan isu-isu strategis. Hasil analisis dari isu-isu strategis adalah rumusan kebijakan yang kemudian dijabarkan dalam bentuk program.

b. Visi dan Misi

✓ Visi

Adapun Visi Pengadilan Negeri Parigi adalah :

“ Terwujudnya Pengadilan Negeri Parigi Yang Agung”

✓ Misi

Untuk mencapai Visi tersebut, Pengadilan Negeri Parigi menetapkan Misi yang menggambarkan hal yang harus dilaksanakan, yaitu :

- *Menjaga Kemandirian Pengadilan Negeri Parigi;*
- *Memberikan Pelayanan Hukum Yang Berkeadilan Kepada Pencari Keadilan;*
- *Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Pengadilan Negeri Parigi;*
- *Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Pengadilan Negeri Parigi*

Atas dasar visi dan misi tersebut di atas maka Mahkamah Agung telah mencanangkan Reformasi Birokrasi dalam Cetak Biru Pembaharuan Peradilan Tahun 2010 – 2035.

Ada 10 Karakter untuk mencapai Badan Peradilan Yang Agung yaitu :

1. Melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman secara efektif.
2. Didukung pengelolaan anggaran berbasis kinerja secara mandiri yang dialokasikan secara proporsional dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
3. Memiliki struktur organisasi yang tepat dan manajemen organisasi yang jelas dan terukur.
4. Melaksanakan manajemen dan administrasi yang sederhana, cepat, tepat waktu, biaya ringan, proporsional, dan adil.
5. Mengelola sarana dan prasarana dalam rangka mendukung lingkungan kerja yang aman, nyaman, dan kondusif bagi penyelenggaraan peradilan.
6. Mengelola dan membina sumber daya manusia yang kompeten dengan kriteria obyektif, sehingga tercipta aparat peradilan yang berintegritas dan profesional.
7. Didukung pengawasan perilaku, administrasi, dan keuangan yang efektif.

8. Berorientasi pada pelayanan publik yang prima.
9. Memiliki manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas, dan transparansi.
10. Berbasis teknologi informasi (TI) terpadu untuk mewujudkan peradilan yang modern.

Dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Pengadilan Negeri Parigi, ke sepuluh karakter pembaharuan peradilan tersebut coba untuk diaplikasikan sebagaimana tertuang dalam rencana kinerja dan penetapan kinerja pada Pengadilan Negeri Parigi.

Upaya untuk mencapai visi dan misi tersebut jelaslah bukan suatu pekerjaan mudah. Diperlukan suatu pemahaman yang mendalam atas permasalahan yang dihadapi dan rencana serta strategi yang tepat dan menyeluruh untuk menjawab permasalahan yang ada. Tujuannya, agar dapat mendorong terwujudnya lembaga peradilan yang bermartabat, berwibawa dan dihormati, tegaknya supremasi hukum.

c. Tujuan Strategis

Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan visi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Dengan diformulasikannya tujuan strategis, Pengadilan Negeri akan dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi misinya untuk kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan dan memungkinkan untuk mengukur sejauh mana visi misi organisasi telah dicapai mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi misi organisasi.

Tujuan yang ditetapkan Pengadilan Negeri Parigi Kelas II adalah :

1. Meningkatnya kepastian hukum

Indikator kinerja untuk mengukur capaian tujuan ini adalah : Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding, kasasi, peninjauan kembali.

Tujuan ini dicapai melalui sasaran :

- ✓ Peningkatan penyelesaian perkara
- ✓ Peningkatan aksesibilitas putusan Hakim
- ✓ Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara
- ✓ Peningkatan kepatuhan terhadap putusan pengadilan

2. Keterjangkauan pelayanan badan peradilan

Indikator kinerja untuk mengukur capaian tujuan ini adalah :

- a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan
- b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan

- c. Persentase Pencari Keadilan Golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)

Tujuan ini dicapai melalui sasaran :

- ✓ Peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan (access to justice)

3. Meningkatkan kualitas pengawasan dan SDM

Indikator kinerja untuk mengukur capaian tujuan ini adalah :

- a. Persentase Pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti;
- b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti;
- c. Persentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial dan non yudisial.

Tujuan ini dicapai melalui sasaran :

- ✓ Peningkatan kualitas pengawasan
- ✓ Peningkatan kualitas SDM

d. Sasaran Strategis

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.

Sesuai dengan reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Negeri Parigi Tahun 2022, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Parigi yang telah direviu adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

Indikator kinerja untuk mengukur capaian sasaran ini adalah :

- a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan
 - Perdata
 - Pidana
- b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu
 - Perdata
 - Pidana
- c. Persentase penurunan sisa perkara :
 - Perdata
 - Pidana
- d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum :
 - Banding
 - Kasasi
 - PK

- e. Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi
 - f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan
2. Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara
Indikator kinerja untuk mengukur capaian sasaran ini adalah :
 - a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu
 - b. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi
 - c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu
 3. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan
Indikator kinerja untuk mengukur capaian sasaran ini adalah :
Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti.
 4. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan
Indikator kinerja untuk mengukur capaian sasaran ini adalah :
 - a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan
 - b. Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan
 - c. Persentase Pencari Keadilan Golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)
 5. Peningkatan Kualitas Pengawasan
Indikator kinerja untuk mengukur capaian sasaran ini adalah :
 - a. Persentase Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti;
 - b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.
 6. Peningkatan Kualiatas SDM
Indikator kinerja untuk mengukur capaian sasaran ini adalah :
Persentase Pegawai yang lulus diklat teknis yudisial dan non yudisial
 7. Peningkatan Penyediaan Sarana dan Prasarana
Indikator kinerja untuk mengukur capaian sasaran ini adalah :
Persentase pengadaan sarana dan prasarana.

Sasaran tersebut merupakan sasaran yang akan Pengadilan Negeri Parigi capai dalam tahun 2020-2024. Adapun sasaran yang akan dicapai dalam tahun 2022 tercerminkan dalam sasaran program yang dituangkan dalam dokumen penetapan kinerja tahun 2022.

Untuk mewujudkan visi dan misi serta sasaran strategis, maka Pengadilan Negeri Parigi mengusulkan program sebagai berikut :

- a. Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Pengadilan Negeri Parigi.
- b. Program peningkatan sarana dan prasarana aparaturnya Pengadilan Negeri Parigi.
- c. Program peningkatan manajemen peradilan umum.

Dari beberapa program yang telah disebutkan di atas, dijabarkan kembali ke dalam beberapa kegiatan, sebagai berikut:

- a. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Pengadilan Negeri Parigi, terbagi ke dalam kegiatan-kegiatan berikut:
 - Pengelolaan gaji, honorarium dan tunjangan, dengan indikator sasaran berupa persentase terbayarnya gaji, lembur, honorarium dan vakasi,
 - Penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran, dengan indikator sasaran berupa :
 - Persentase terselenggaranya pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan.
 - Persentase terselenggaranya konsultasi dan koordinasi secara terpadu.
 - Peningkatan kualitas dan profesionalitas sumber daya manusia, dengan indikator sasaran berupa :
 - Persentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial dan non yudisial.
 - Persentase pengiriman laporan tepat waktu.
 - Peningkatan pengawasan baik struktural maupun fungsional
 - Persentase pengaduan yang ditindak lanjuti.
 - Persentase temuan yang ditindak lanjuti.
- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana, terdiri atas kegiatan:
 - Pengadaan sarana dan prasarana peradilan dalam mendukung kinerja, dengan indikator sasaran berupa, persentase tepenuhinya pengadaan sarana dan prasarana perkantoran.
 - Pemberdayaan sarana dan prasarana teknologi informatika secara maksimal yang ditujukan untuk peningkatan kualitas kerja dan pelayanan kepada masyarakat, dengan indikator sasaran berupa :
 - Persentase mengenai keadaan perkara yang dapat dipublikasikan.
 - Persentase mengenai Barang Milik Negara (BMN) yang telah dimiliki.
 - Persentase mengenai anggaran yang telah diserap.
- c. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum, terdiri atas kegiatan :

- Penyelesaian perkara pidana dan perdata ditingkat pertama dan banding yang tepat waktu
- Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) Pengadilan Negeri Parigi
- Penyelesaian perkara melalui sidang diluar gedung pengadilan
- Penyelesaian perkara peradilan melalui pembebasan biaya perkara.

e. Indikator Kinerja Utama

Pengadilan Negeri Parigi telah melakukan review Indikator Kinerja Utama melalui SK Ketua Pengadilan Negeri Parigi Nomor : W21-U7/1348.a/KP.04.6/06/2022 Tanggal 24 Juni 2022, sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan organisasi. Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Negeri Parigi Tahun 2022 sebagai berikut :

Tabel 1. Indikator Kinerja Utama

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan Tepat Waktu : - Perdata - Pidana	- Perbandingan antara jumlah perkara perkara yang diselesaikan teapt waktu dengan jumlah sisa perkara yang diselesaikan yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	- Perbandingan antara perkara yang diselesaikan dengan restorative dengan jumlah perkara yang diajukan untuk restoratif	Panitera	Laporan Bulanan Dan Laporan Tahunan
		c. Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding	- Perbandingan antara jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding dengan jumlah perkara yang diselesaikan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		d. Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	- Perbandingan antara jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi dengan jumlah perkara khusus yang diselesaikan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
		e. Persentase Perkara Pidana anak yang diselesaikan dengan Diversi	- Perbandingan Jumlah Perkara diversifikasi yang dinyatakan berhasil dengan jumlah perkara diversifikasi	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.	- Index Kepuasan Pencari Keadilan Catatan : Sesuai PERPMENPAN Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.	Panitera	Laporan Semesteran dan laporan Tahunan
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Salinan putusan yang disampaikan kepada para pihak Tepat Waktu	- Perbandingan Salinan putusan yang diminutasi dan dikirim tepat waktu dengan jumlah putusan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	- Perbandingan antara jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi berhasil dengan jumlah perkara yang dilakukan Mediasi.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
3.	Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	- Perbandingan antara Perkara Prodeo yang diselesaikan dengan jumlah perkara Prodeo yang diajukan secara prodeo	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase Perkara Yang Diselesaikan Di Luar Gedung Pengadilan	- Perbandingan Jumlah perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan dengan jumlah perkara yang diajukan diselesaikan diluar gedung pengadilan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	- Perbandingan jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan Layanan bantuan Hukum dengan Jumlah Permohonan Layanan Hukum	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	- Perbandingan jumlah eksekusi yang telah dilaksanakan dengan Jumlah Permohonan Eksekusi	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

f. Rencana Kinerja

Rencana Kinerja merupakan turunan atau pelaksanaan tahunan dari Renstra. Adapun Rencana Kinerja Tahun 2022 Pengadilan Negeri Parigi yaitu :

Tabel 2. Rencana Kinerja Tahunan

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Anggaran (Rp)
1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu : - Perdata - Pidana	96 %	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Perkara Pidana Yang Diselesaikan ditingkat pertama di Wilayah Sulawesi tengah	160 Perkara	59.584.000
	b. Persentase putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	0%					
	c. Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum, Banding,	81%					
	d. Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	81%					
	e. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan Diversi	26%					
	f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	86%					

PENGADILAN NEGERI PARIKI KELAS II

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Anggaran (Rp)
2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	<p>a. Persentase Salinan Putusan yang dikirimkan ke para pihak tepat waktu</p> <p>b. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi</p>	100 % 5 %	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Perkara Pidana Yang Diselesaikan ditingkat pertama di Wilayah Sulawesi tengah	160 Perkara	59.584.000
3. Meningkatkan Kepatuhan Terhadap Putusan pengadilan	a. Persentase putusan perkara Perdata yang Ditindak lanjut(diekseskusi)	95 %					
4. Meningkatkan Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan terpinggirkan	<p>a. Persentase Perkara PRODEO yang diselesaikan</p> <p>b. Presentase Perkara yang diselesaikan diluar Gedung Pengadilan</p> <p>c. Persentase Pencari Keadilan golongan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)</p>	100% 100 %	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Jumlah perkara Peradilan Umum yang diselesaikan melalui sidang diluar gedung pengadilan	0 Perkara	0
					Jumlah Masyarakat pencari keadilan yang mendapat layanan bantuan hukum	192 Jam layanan	19.200.000

PENGADILAN NEGERI PARIGI KELAS II

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Anggaran (Rp)
5. Peningkatan Kualitas Pengawasan	a. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti	100 %	Program Dukungan Manajemen.	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi.	Jumlah Pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti		
	b. Persentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial dan non yudisial	100 %	Program Dukungan Manajemen	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Jumlah temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti	2 LHP	
6. Peningkatan Kualitas SDM	a. Persentase Pegawai yang lulus diklat teknis yudisial dan non yudisial	100 %	Program Dukungan Manajemen		Jumlah pegawai yang mengikuti dan lulus diklat teknis dan non teknis	Orang	
7. Peningkatan Penyediaan Sarana dan Prasarana	Persentase pengadaan sarana dan prasarana	100 %		Pengadaan sarana dan Prasarana di lingkungan mahkamah Agung	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	1 Layanan	505.773.000

g. Penetapan Kinerja Tahun 2022

Penetapan kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Dalam penetapan Kinerja tahun 2022 dilakukan sinkronisasi berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Negeri Parigi, yang memuat sasaran strategis, indikator kinerja dan target yang hendak dicapai sebagaimana terangkum dalam tabel di bawah ini :

Tabel 3. Penetapan Kinerja
Perjanjian Kinerja Tahunan
Pengadilan Negeri Parigi Tahun 2022

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	100 %
	b. Jumlah Pendekatan yang menggunakan keadilan restorative	0 %
	c. Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum, Banding	81 %
	d. Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	81 %
	e. Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi	26 %
	f. Indeks persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	86 %
2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Salinan Putusan yang disampaikan kepada para pihak tepat waktu	100%
	b. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	5 %

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	100 %
	b. Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan	100 %
	c. Persentase Pencari Keadilan golongan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100 %
4. Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan pengadilan	a. Presentase Putusan Perkara Perdata yang ditindak lanjuti (Eksekusi)	95 %
5. Peningkatan Kualitas Pengawasan	a. Persentase Pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100 %
	b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti	100 %
6. Peningkatan Kualitas SDM	a. Persentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial dan non yudisial	100 %
7. Peningkatan Penyediaan Sarana dan Prasarana	Persentase pengadaan sarana dan prasarana	100 %

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Laporan Akuntabilitas kinerja merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung jawaban kinerja Pengadilan Negeri Parigi Kelas II dalam mencapai tujuan/sasaran strategis. Akuntabilitas kinerja merupakan uraian pertanggung jawaban kinerja yang terdiri dari hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja, termasuk uraian keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil sebagai implementasi pelaksanaan kebijakan dan program sesuai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pengadilan Negeri Parigi Kelas II

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Negeri Parigi Kelas II tahun 2022 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran. Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian target indikator kinerja sasaran, namun demikian juga terdapat beberapa indikator kinerja sasaran yang belum berhasil diwujudkan pencapaian targetnya pada tahun 2022 ini. Pengadilan Negeri Parigi Kelas II telah melakukan beberapa analisis dan evaluasi agar terdapat perbaikan di masa yang akan datang.

A. Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja dimaksudkan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi.

Berdasarkan penetapan kinerja Tahun 2022, terdapat 7 (tujuh) sasaran strategis yang pencapaiannya diukur dengan mengaplikasikan 15 (lima belas) indikator kinerja. Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Negeri Parigi tahun 2022 dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi masing-masing indikator kinerja dengan target yang ditetapkan pada tahun tersebut.

$$\text{Tingkat capaian kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana/Target}} \times 100\%$$

Hasil pengukuran terhadap tingkat capaian Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Parigi Tahun 2022 dapat diilustrasikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 4. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2022

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
NO	KINERJA UTAMA				
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase Perkara Yang Diselesaikan tepat waktu	100%	96,75%	96,75%
		b. Persentase Putusan yang menggunakan penekatan keadilan restoratif	0%	-	0%
		c. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	80%	73,51%	91,88%
		d. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum kasasi	93%	73,51%	83,26%
		e. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan Dengan Diversi:	5 %	-	-
		f. Index Responden Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	IKM : 98%, Kategori : Sangat Baik	IKM : 97,98 %, Kategori : Sangat Baik	99,97%
Rata-rata capaian kinerja pada Sasaran Strategis I					78,37%
2	Peningkatan Efektivitas Pengelola Penyelesaian Perkara	a. Persentase Salinan Putusan Yang yang dikirimkan kepada Para Pihak Tepat Waktu	100%	100%	100%
		b. Persentase Perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi	5%	2,60%	52%
Rata-rata capaian kinerja pada Sasaran Strategis II					76%

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
NO	KINERJA UTAMA				
3.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	10 %	0,1 %	1 %
Rata-rata capaian kinerja pada Sasaran Strategis III					1%
4.	Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo Yang Diselesaikan	100 %	-	0%
		b. Persentase Perkara Yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	100 %	100%	100%
		c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100 %	100%	100%
Rata-rata capaian kinerja pada Sasaran Strategis IV					100%
5.	Peningkatan Kualitas Pengawasan	a. Persentase Pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100 %	100%	100%
		b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti	100 %	100 %	100 %
Rata-rata capaian kinerja pada Sasaran Strategis V					100 %
6.	Peningkatan Kualitas SDM	Persentase Pegawai yang lulus diklat teknis yudisial dan non yudisial	100 %	100 %	100 %
Rata-rata capaian kinerja pada Sasaran Strategis VI					100 %
7.	Peningkatan Penyediaan Sarana dan Prasarana	Persentase pengadaan sarana dan prasarana	100 %	100 %	100 %
Rata-rata capaian kinerja pada Sasaran Strategis VII					100 %
Rata-Rata Capaian Kinerja secara Keseluruhan					79.34%

Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam tahun 2022 secara umum Pengadilan Negeri Parigi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi telah dapat mencapai keberhasilan yang dapat ditunjukkan dari pencapaian sebagian besar target indikator kinerja utama (IKU). Namun ditahun selanjutnya diharapkan untuk lebih

meningkatkan pencapaian sasaran utamanya dalam hal efektifitas penanganan perkara utamanya mediasi dan tindak lanjut hasil putusan pengadilan (eksekusi).

Pengadilan Negeri Parigi telah melakukan analisis dan evaluasi atas capaian kinerja tahun 2020 sampai dengan 2022, untuk mendapatkan informasi guna melakukan perbaikan pada Rencana Kinerja Tahunan dan Rencana Strategis secara berkesinambungan.

B. ANALISA AKUNTABILITAS KINERJA

Pengukuran kinerja Pengadilan Negeri Parigi Tahun 2022 mengacu pada indikator kinerja utama sebagaimana tertuang pada tabel di atas, untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Pada akhir tahun 2022, Pengadilan Negeri Parigi telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Adapun hasil capaian kinerja sesuai sasaran yang ditetapkan, diuraikan sebagai berikut :

➤ *Sasaran Strategis 1 : Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan Dan Akuntabel*

Sasaran “Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel” dimaksudkan untuk menggambarkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan peradilan dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri Parigi. Peningkatan penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri Parigi merupakan sasaran strategis untuk mewujudkan visi dan misi yang tercantum pada rencana strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Parigi Tahun 2018-2024. Keberhasilan sasaran ini dapat diukur melalui 5 (lima) indikator kinerja yang diwujudkan melalui pelaksanaan program peningkatan manajemen peradilan umum.

Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran 1 yaitu “Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel” pada tahun 2022 serta perbandingannya dengan 4 tahun sebelumnya ditampilkan pada tabel berikut ini :

Tabel 5. Realisasi dan Capaian Sasaran Strategis I

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA	TARGET 2022	REALISASI 2022	CAPAIAN 2022
NO	KINERJA UTAMA				
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase Perkara Yang Diselesaikan tepat waktu:	96%	97.99%	102,07%
		b. Persentase Putusan yang menggunakan penekatan keadilan restoratif	0%	-	0%

	c. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	81%	93,97%	116,02%
	d. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum kasasi	81%	0%	0%
	e. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan Dengan Diversi:	26%	0%	0%
	f. Index Responden Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	IKM : 86%, Kategori : Sangat Baik	IKM : 110,46 %, Kategori : Sangat Baik	128,44%
Rata-rata capaian kinerja pada Sasaran Strategis I				69,30 %

Tabel 6. Perbandingan Capaian Sasaran Strategis I

INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2022	CAPAIAN 2021	CAPAIAN 2020	CAPAIAN 2019	CAPAIAN 2018
a. Persentase Perkara Yang diselesaikan tepat waktu	102,07%	98,55%	113,12%	79,02%	89 %
b. Persentase Putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif.	0%	0%	0%	0%	0%
c. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum: Banding	116,02%	114,57%	128,13%	66,74%	66,74%
d. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum: Kasasi	0%	70,82%	77,14%	82,13%	66,74%
d. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan Dengan Diversi:	100%	500%	28,57%	28,57%	0%
e. Index Responden Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	128,44%	113,64%	107,67%	98%	98%
Rata-rata capaian kinerja pada Sasaran Strategis I	74,42%	149,59%	74,16%	59,07%	53,41%

Analisa terhadap pencapaian masing-masing target indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :

a. Indikator Kinerja I.a : Persentase Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara jumlah perkara yang diselesaikan tahun berjalan dengan jumlah perkara yang ada, difungsikan sebagai berikut :

Target indikator kinerja ini pada tahun 2022, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2022 adalah masing-masing sebesar 100 %. Realisasi dan capaian indikator kinerja “Persentase Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu” pada tahun 2022 serta perbandingannya dengan 4 tahun sebelumnya ditampilkan pada tabel berikut ini :

Tabel 7. Perbandingan Realisasi Indikator Penyelesaian Perkara yang diselesaikan Tepat Waktu

Indikator Kinerja	Realisasi (%)					Target 2022 (%)	Capaian (%)
	2018	2019	2020	2021	2022		
Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu.	89	79,02	113,12	98,55	102,07	96	96.35

Berdasarkan data-data tersebut maka realisasi indikator kinerja ini pada tahun 2022 adalah sebesar 96,35% dengan perhitungan sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah Perkara Yang Diselesaikan tepat Waktu} \times 100 \%}{\text{Jumlah Perkara Yang Diselesaikan}}$$

$$\text{Realisasi} = \frac{293}{299} \times 100\% = 96,35 \%$$

Capaian diperoleh dengan membandingkan antara realisasi dan target, dimana pada tahun 2022 target capaian untuk indikator kinerja ini adalah sebesar 96 %.

Capaian presentase

$$\text{Perkara yang diselesaikan tepat waktu} = \frac{96,35 \%}{100 \%} \times 100 \% = 96,35 \%$$

Persentase Penyelesaian perkara yang diselesaikan tepat waktu, yang ditargetkan selesai 96 % pada tahun 2022, dapat tercapai sebesar 96,35%. Hal ini menunjukkan bahwa telah terjadi kenaikan kinerja dalam penanganan perkara perdata dan perkara pidana

yang diselesaikan tepat waktu pada Pengadilan Negeri Parigi di tahun 2022 jika dibandingkan dari tahun sebelumnya.

b. Indikator Kinerja I.b : Jumlah Putusan yang Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara Jumlah Perkara yang diselesaikan dengan restoratif dibagi dengan Perkara yang diajukan untuk restoratif, difungsikan sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan dengan restoratif}}{\text{Perkara yang diajukan untuk restoratif}} \times 100 \%$$

Target indikator kinerja ini pada tahun 2022, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2022 adalah sebesar 0 %. Realisasi dan capaian indikator kinerja “*Jumlah Putusan yang Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif*” pada tahun 2022 serta perbandingannya dengan tahun sebelumnya ditampilkan pada tabel berikut ini :

Tabel 8. Perbandingan Realisasi Indikator Putusan menggunakan pendekatan keadilan restoratif

Indikator Kinerja	Realisasi (%)					Target 2021 (%)	Capaian (%)
	2018	2019	2020	2021	2022		
Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	0	0	0	0	0	2	0

Berdasarkan data-data tersebut maka realisasi indikator kinerja ini pada tahun 2022 adalah 0 % dengan perhitungan sebagai berikut :

$$\text{Realisasi} = \frac{0}{0} \times 100 \% = 0 \%$$

Capaian diperoleh dengan membandingkan antara realisasi dan target, dimana pada tahun 2022 capaian untuk indikator kinerja ini adalah 0%.

$$\text{Capaian Perkara} = \frac{0}{2} \times 100 \% = 0 \%$$

Jumlah putusan perkara pidana yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif, yang ditargetkan 0 % pada tahun 2022, belum dapat dicapai secara

maksimal dengan nilai capaian 0 %. Capaian ini memberikan gambaran untuk perkara pidana dengan menggunakan pendekatan keadilan restorative ditahun 2022 jumlah sisa perkara masih sama dengan tahun sebelumnya. Sehingga hal ini memberikan gambaran efektifitas penyelesaian perkara yang salah satunya disebabkan karena volume perkara dan SDM hakim dan panitera pengganti yang terbatas.

c. Indikator Kinerja I.c : Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding dengan jumlah perkara yang diselesaikan, difungsikan sebagai berikut :

$$\frac{\text{Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding}}{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan}} \times 100 \%$$

Target indikator kinerja ini pada tahun 2022, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2022 adalah sebesar 80 %. Realisasi dan capaian indikator kinerja “*Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding*” pada tahun 2022 serta perbandingannya dengan 4 tahun sebelumnya ditampilkan pada tabel berikut ini :

Tabel 9. Perbandingan Realisasi Perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Banding

Tahun	Jenis Perkara	Putus	Perkara Yg Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	Realisasi Rasio Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding (%)
2022	Perkara Perdata	100	95	95
	Perkara Pidana	199	186	93,46
2021	Perkara Perdata	81	53	65,43
	Perkara Pidana	264	224	84,84
2020	Perkara Perdata	181	157	86,74
	Perkara Pidana	285	261	91,57
2019	Perkara Perdata	120	96	80
	Perkara Pidana	237	229	96,62
2018	Perkara Perdata	78	71	91,02
	Perkara Pidana	219	208	94,97

Tabel 10. Perbandingan Realisasi dan Capaian Perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum banding Tahun 2022

Indikator Kinerja	Realisasi (%)					Target 2022 (%)	Capaian (%)
	2018	2019	2020	2021	2022		
Persentase perkara perdata yang tidak mengajukan upaya hukum banding.	91,02	80	86,74	65,43	95	81	117,28
Persentase perkara pidana yang tidak mengajukan upaya hukum banding.	94,97	96,62	91,57	84,84	93,46	81	113,93

Berdasarkan data-data tersebut maka realisasi indikator kinerja ini pada tahun 2022 adalah sebesar 95% dan 93,46% dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding}}{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan}} \times 100 \%$$

$$\text{Realisasi Perdata} = \frac{95}{100} \times 100\% = 95 \%$$

$$\text{Realisasi Pidana} = \frac{186}{199} \times 100\% = 93,46 \%$$

Capaian diperoleh dengan membandingkan antara realisasi dan target, dimana pada tahun 2022 capaian untuk indikator kinerja ini adalah sebesar 117,28% untuk perdata, dan capaian untuk pidana sebesar 113,93%

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\text{Realisasi Perdata} = \frac{95\%}{81\%} \times 100\% = 117,28 \%$$

$$\text{Realisasi Pidana} = \frac{93,46\%}{81\%} \times 100\% = 113,93 \%$$

Persentase perkara perdata dan pidana yang tidak mengajukan upaya hukum, yang ditargetkan 81% pada tahun 2022, dapat tercapai sebesar 95% dan 93,46%. Capaian ini memberikan gambaran bahwa kualitas putusan ditahun 2022 semakin baik, dan masyarakat pencari keadilan semakin puas terhadap putusan pengadilan.

d. Indikator Kinerja I.c : Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi dengan jumlah perkara khusus yang diselesaikan, difungsikan sebagai berikut :

$$\frac{\text{Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi}}{\text{Jumlah Perkara Khusus yang diselesaikan}} \times 100 \%$$

Target indikator kinerja ini pada tahun 2022, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2022 adalah sebesar 93 %. Realisasi dan capaian indikator kinerja **“Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi”** pada tahun 2022 serta perbandingannya dengan 4 tahun sebelumnya ditampilkan pada tabel berikut ini :

Tabel 11. Perbandingan Realisasi Perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum kasasi

Tahun	Jenis Perkara	Putus	Perkara Yg Tidak Mengajukan Upaya Hukum kasasi	Realisasi Rasio Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi (%)
2022	Perkara Perdata	13	13	100
	Perkara Pidana	2	0	0
2021	Perkara Perdata	0	0	0
	Perkara Pidana	3	0	0
2020	Perkara Perdata	0	0	0
	Perkara Pidana	1	0	0
2019	Perkara Perdata	0	0	0
	Perkara Pidana	2	0	0
2018	Perkara Perdata	0	0	0
	Perkara Pidana	0	0	0

Tabel 12. Perbandingan Realisasi dan Capaian Perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum kasasi Tahun 2022

Indikator Kinerja	Realisasi (%)					Target 2022 (%)	Capaian (%)
	2018	2019	2020	2021	2022		
Persentase perkara perdata yang tidak mengajukan upaya hukum banding.	0	0	0	0	100	81	123,45
Persentase perkara pidana yang tidak mengajukan upaya hukum banding.	0	0	0	0	0	81	0

Berdasarkan data-data tersebut maka realisasi indikator kinerja ini pada tahun 2022 adalah sebesar 123,45 % dan 0% dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum kasasi}}{\text{Jumlah Perkara Khusus yang diselesaikan}} \times 100 \%$$

$$\text{Realisasi Perdata} = \frac{13\%}{13\%} \times 100\% = 100 \%$$

$$\text{Realisasi Pidana} = \frac{0\%}{2\%} \times 100\% = 0 \%$$

Capaian diperoleh dengan membandingkan antara realisasi dan target, dimana pada tahun 2022 capaian untuk indikator kinerja ini adalah sebesar 0% untuk perdata, dan capaian untuk pidana sebesar 0%

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\text{Realisasi Perdata} = \frac{13\%}{13\%} \times 100\% = 100\%$$

$$\text{Realisasi Pidana} = \frac{0\%}{2\%} \times 100\% = 0\%$$

Persentase perkara perdata dan pidana yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi, yang ditargetkan 81% pada tahun 2022, dapat tercapai sebesar 0% dan 0%. Capaian ini memberikan gambaran bahwa ditahun 2022 tidak adanya perkara Khusus yang mengajukan upaya hokum Kasasi.

e. Indikator Kinerja I.d : Persentase Perkara Pidana Anak Yang Diselesaikan Dengan Diversi

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara jumlah perkara diversi yang dinyatakan berhasil dengan jumlah perkara diversi, difungsikan sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah Perkara Diversi yang dinyatakan berhasil}}{\text{Jumlah Perkara Diversi}} \times 100\%$$

Target indikator kinerja ini pada tahun 2022, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2022 adalah sebesar 26 %. Realisasi dan capaian indikator kinerja **“Persentase Perkara Anak Yang Diselesaikan Dengan Diversi”** pada tahun 2022 serta perbandingannya dengan tahun sebelumnya ditampilkan pada tabel berikut ini :

Tabel 13. Perbandingan Realisasi Perkara Anak yang Diselesaikan dengan Diversi

Tahun	Perkara Pidana Anak	Perkara pidana anak yang diselesaikan melalui diversi	Realisasi persentase Perkara pidana anak yang diselesaikan melalui diversi (%)
2022	1	0	0
2021	2	0	0
2020	5	0	0
2019	4	0	0
2018	9	0	0

Tabel 14. Perbandingan Realisasi dan Capaian Perkara Anak yang Diselesaikan dengan Diversi Tahun 2022

Indikator Kinerja	Realisasi (%)					Target 2022 (%)	Capaian (%)
	2018	2019	2020	2021	2022		
Persentase perkara anak yang diselesaikan melalui diversi.	0	0	0	0	0	26	0

Berdasarkan data-data tersebut maka realisasi indikator kinerja ini pada tahun 2022 adalah 0% dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Perkara Diversi yang dinyatakan berhasil}}{\text{Jumlah Perkara diversi}} \times 100 \%$$

$$\begin{aligned} \text{Realisasi} &= \frac{0}{1} \times 100 \% \\ &= 0 \% \end{aligned}$$

Capaian diperoleh dengan membandingkan antara realisasi dan target, dimana pada tahun 2022 capaian untuk indikator kinerja ini adalah sebesar 0%.

$$\begin{aligned} \text{Capaian} &= \frac{0\%}{26 \%} \times 100 \% \\ &= 0\% \end{aligned}$$

Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi, yang ditargetkan 26% pada tahun 2022 belum dapat direalisasikan ditahun 2022 dikarenakan sebagian besar proses diversi telah selesai dikepolisian, diharapkan kedepannya penyelesaian perkara pidana anak melalui diversi dapat ditingkatkan.

f. Indikator Kinerja If : Index Responden Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan

Survei kepuasan masyarakat ini bertujuan untuk mengukur kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik di Pengadilan Negeri Parigi sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara hasil kuisisioner dengan jumla responden.

Target indikator kinerja ini pada tahun 2022, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2022 adalah sebesar 86 %. Realisasi dan capaian indikator kinerja “Index Responden Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan” pada tahun 2022 ditampilkan pada tabel berikut ini :

Tabel 15. Perbandingan Realisasi Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat

Keterangan	2018	2019	2020	2021	2022
Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	78,40%, 100 Responden	86,14%, 100 Responden	90,94%, 100 Responden	97,37, 56 Responden Di tw IV	98,78% 16 Responden di TW IV

Tabel 16. Perbandingan Realisasi dan Capaian IKM 2022

Indikator Kinerja	Realisasi					Target 2022 (%)	Capaian (%)
	2018	2019	2020	2021	2022		
Indeks Responden yang puas terhadap layanan pengadilan.	78,40	86,14	90,94	97,37	98,78	80	123,47

Berdasarkan data-data tersebut maka realisasi indikator kinerja ini pada tahun 2022 adalah sebesar 98,78%. Hasil ini menggambarkan bahwa kepuasan masyarakat terhadap layanan peradilan pada Pengadilan Negeri Parigi cukup baik dan terus meningkat dari tahun ke tahun.

Capaian diperoleh dengan membandingkan antara realisasi dan target, dimana pada tahun 2022 capaian untuk indikator kinerja ini adalah sebesar 123,47%.

$$Capaian = \frac{Realisasi}{Target} \times 100\%$$

$$Capaian = \frac{98,78\%}{80\%} \times 100\% \\ = 123,47\%$$

Capaian Persentase index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan, yang ditargetkan 80% pada tahun 2022, dapat tercapai 123,47% dari yang ditargetkan dan meningkat dari tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan peningkatan kepuasan masyarakat pencari keadilan dan pengguna layanan pengadilan terhadap pelayanan yang diberikan oleh Pengadilan Negeri Parigi. Di tahun mendatang Pengadilan Negeri Parigi berkomitmen untuk terus memberikan Pelayanan terbaik kepada masyarakat melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia dan penyediaan sarana prasarana yang dibutuhkan.

➤ **Sasaran Strategis 2 : Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Dan Penyelesaian Perkara**

Sasaran ini dimaksudkan untuk menggambarkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan peradilan dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri Parigi. Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran “Peningkatan Efektifitas Pengelola Penyelesaian Perkara” meliputi 2 (dua) indikator kinerja melalui pelaksanaan program peningkatan manajemen peradilan umum.

Realisasi dan capaian indikator kinerja sasaran “**Peningkatan Efektifitas Pengelola Penyelesaian Perkara**” pada tahun 2022 serta perbandingannya dengan tahun sebelumnya ditampilkan pada tabel berikut ini :

Tabel 17. Realisasi dan Capaian Sasaran Strategis II

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA	TARGET 2022	REALISASI 2022	CAPAIAN 2022
NO	KINERJA UTAMA				
2	Peningkatan Efektifitas Pengelola Penyelesaian Perkara	a. Persentase salinan Putusan Yang disampaikan kepada Para Pihak Tepat Waktu	100%	100%	100%
		b. Persentase Perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi	5 %	1,56 %	31,25%
Rata-rata capaian kinerja pada Sasaran Strategis II					65,62%

Tabel 18. Perbandingan Capaian Sasaran Strategis II

INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2022	CAPAIAN 2021	CAPAIAN 2020	CAPAIAN 2019	CAPAIAN 2018
a. Persentase Salinan Putusan Yang Disampaikan kepada Para Pihak Tepat Waktu	100%	100%	100%	100%	100%
b. Persentase Perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi	31,25 %	3,38 %	33,82%	93%	100%
Rata-rata capaian kinerja pada Sasaran Strategis II	65,62%	51,69%	66,91%	96,5%	100%

Analisa terhadap pencapaian masing-masing target indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :

a. Indikator Kinerja 2.a : Persentase Salinan Putusan Yang Disampaikan kepada Para Pihak Tepat Waktu

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara jumlah Salinan yang diminutasi dan dikirim tepat waktu dengan jumlah putusan, difungsikan sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah Salinan putusan yang diminutasi dan dikirim tepat waktu}}{\text{Jumlah Putusan}} \times 100 \%$$

Target indikator kinerja ini pada tahun 2022, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2022 adalah sebesar 100 %. Realisasi dan capaian indikator kinerja **“Persentase Salinan Putusan Yang Disampaikan kepada Para Pihak Tepat Waktu”** pada tahun 2022 serta perbandingannya dengan 4 tahun sebelumnya ditampilkan pada tabel berikut ini :

Tabel 19. Perbandingan Realisasi Putusan Yang Diterima Tepat Waktu

Keterangan	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah salinan Putusan Yang Diterima Tepat Waktu	297	357	466	345	299
Jumlah Putusan	297	357	466	345	299

Tabel 20. Perbandingan Realisasi dan Capaian Putusan yang Diterima Tepat Waktu Tahun 2022

Indikator Kinerja	Realisasi					Target 2021 (%)	Capaian (%)
	2018	2019	2020	2021	2022		
Persentase Isi Putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu.	100	100	100	100	100	100	100

Berdasarkan data-data tersebut maka realisasi indikator kinerja ini pada tahun 2022 adalah sebesar 100 % dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jmlh Isi Putusan Yang Diterima Tepat Waktu}}{\text{Jumlah Putusan}} \times 100 \%$$

$$\begin{aligned} \text{Realisasi} &= \frac{299}{299} \times 100 \% \\ &= 100 \% \end{aligned}$$

Capaian diperoleh dengan membandingkan antara realisasi dan target, dimana pada tahun 2022 capaian untuk indikator kinerja ini adalah sebesar 100 %.

$$\begin{aligned} \text{Capaian} &= \frac{100\%}{100\%} \times 100\% \\ &= 100\% \end{aligned}$$

Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu, yang ditargetkan 100% pada tahun 2022, pencapaiannya mencapai 100%. Menunjukkan bahwa sistem kerja yang berlaku di lingkungan Pengadilan Negeri Parigi telah berjalan dengan baik dan lancar, dimana seluruh perkara yang telah putus segera diberitahukan kepada para pihak sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan, capaian kinerja ini akan terus dipertahankan sebagai bentuk pelayanan prima yang diberikan kepada masyarakat pencari keadilan.

b. Indikator Kinerja 2.b : Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi berhasil dengan jumlah perkara yang dilakukan Mediasi, difungsikan sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi Berhasil}}{\text{Jumlah Perkara yang dilakukan Mediasi}} \times 100\%$$

Target indikator kinerja ini pada tahun 2022, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2021 adalah sebesar 5 %. Realisasi dan capaian indikator kinerja **“Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi”** pada tahun 2022 serta perbandingannya dengan tahun sebelumnya ditampilkan pada tabel berikut ini :

Tabel 21. Perbandingan Jumlah Perkara Mediasi dan Berhasil Mediasi

Keterangan	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi berhasil	0	1	0	1	1
Jumlah Perkara yang dilakukan Mediasi	31	39	66	53	64

Tabel 22. Perbandingan Realisasi dan Capaian Perkara Yang Berhasil Mediasi 2022

Indikator Kinerja	Realisasi (%)					Target 2021 (%)	Capaian (%)
	2018	2019	2020	2021	2022		
Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi.	0	2,56	0	1,88	1,56	5	1,2

Berdasarkan data-data tersebut maka realisasi indikator kinerja ini pada tahun 2022 adalah sebesar 5 % dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi berhasil}}{\text{Jumlah Perkara yang dilakukan mediasi}} \times 100 \%$$

$$\begin{aligned} \text{Realisasi} &= \frac{1}{64} \times 100 \% \\ &= 1,56 \% \end{aligned}$$

Capaian diperoleh dengan membandingkan antara realisasi dan target, dimana pada tahun 2022 capaian untuk indikator kinerja ini adalah sebesar 5 %.

$$\begin{aligned} \text{Capaian} &= \frac{1,56\%}{5 \%} \times 100 \% \\ &= 31,2 \% \end{aligned}$$

Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi pada tahun 2022 yang ditargetkan 5%, dapat tercapai 31,2%. Menunjukkan bahwa efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara di lingkungan Pengadilan Negeri Parigi dalam hal mediasi sudah cukup baik, hal tersebut dikarenakan beberapa hal diantaranya usaha maksimal dan profesionalisme dari hakim mediator dalam upaya mendamaikan pihak yang berperkara. Ditahun berikutnya diharapkan penyelesaian perkara melalui mediasi lebih meningkat dengan dukungan sumber daya manusia (hakim mediator) yang lebih berkompten, selain itu perlu dilakukan program penyuluhan kepada masyarakat agar masyarakat lebih sadar hukum.

➤ **Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin Dan Terpinggirkan**

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran **“Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan”**

meliputi 3 (tiga) indikator kinerja yang diwujudkan melalui pelaksanaan program peningkatan manajemen peradilan umum.

Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran ini pada tahun 2022 serta perbandingannya dengan tahun sebelumnya ditampilkan pada tabel berikut ini :

Tabel 23. Realisasi dan Capaian Kinerja Sasaran Strategis III

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA	TARGET 2022	REALISASI 2022	CAPAIAN 2022
NO	KINERJA UTAMA				
3	Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo Yang Diselesaikan	100%	0%	0%
		b. Persentase Perkara Yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	100%	0%	0%
		c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapat Layanan Hukum Bantuan (Posbakum)	100%	100%	100%
Rata-rata capaian kinerja pada Sasaran Strategis III					33,33%

Tabel 27. Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Strategis III

INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2022	CAPAIAN 2021	CAPAIAN 2020	CAPAIAN 2019	CAPAIAN 2018
a. Persentase Perkara Prodeo Yang Diselesaikan	0%	0%	0%	0%	0%
b. Persentase Perkara Yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	0%	0%	0%	0%	0%
c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapat Layanan Hukum Bantuan (Posbakum)	100%	100%	100%	100%	100%
Rata-rata capaian kinerja pada Sasaran Strategis IV	33,33%	33,33	33,33	33,33	33,33

Analisa terhadap pencapaian masing-masing target indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :

a. Indikator Kinerja 3.a : Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara jumlah perkara prodeo yang diselesaikan dengan jumlah perkara yang diajukan secara prodeo, difungsikan sebagai berikut :

$$\frac{\Sigma \text{ Perkara Prodeo yg diselesaikan}}{\Sigma \text{ Perkara yang diajukan secara Prodeo}} \times 100 \%$$

Target indikator kinerja ini pada tahun 2022, sebagaimana ditetapkan melalui

Penetapan Kinerja Tahun 2022 adalah sebesar 100 %. Realisasi dan capaian indikator kinerja "**Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan**" pada tahun 2022 serta perbandingannya dengan tahun sebelumnya ditampilkan pada tabel berikut ini :

Tabel 28. Jumlah Perkara Prodeo Yang diselesaikan

Keterangan	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah Perkara Prodeo yang diselesaikan	-	-	-	-	-
Jumlah perkara prodeo	-	-	-	-	-

Berdasarkan data-data tersebut maka realisasi indikator kinerja ini pada tahun 2022 adalah 0 % dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah perkara prodeo yg diselesaika}}{\text{Jumlah Perkara yang diajukan secara Prodeo}} \times 100$$

$$\begin{aligned} \text{Realisasi} &= \frac{0}{0} \times 100 \% \\ &= 0 \% \end{aligned}$$

Capaian diperoleh dengan membandingkan antara realisasi dan target, dimana pada tahun 2022 capaian untuk indikator kinerja ini adalah sebesar 0 %, dikarenakan tidak adanya masyarakat yang mendaftarkan perkara perdata secara prodeo. Diharapkan ditahun berikutnya semakin meningkat masyarakat miskin/terpinggirkan yang memperoleh layanan pengadilan .

$$\begin{aligned} \text{Capaian} &= \frac{0 \%}{100 \%} \times 100 \% \\ &= 0 \% \end{aligned}$$

b. Indikator Kinerja 3.b : Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara jumlah perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan dengan jumlah perkara yang diajukan diselesaikan di luar gedung pengadilan, difungsikan sebagai berikut :

$$\frac{\Sigma \text{ Perkara yg diselesaikan di luar gedung pengadilan}}{\Sigma \text{ Perkara yg diajukan diselesaikan di luar gedung pengadilan}} \times 100 \%$$

Target indikator kinerja ini pada tahun 2022, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2022 adalah 100 %. Realisasi dan capaian indikator kinerja “*Persentase Perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan*” pada tahun 2022 serta perbandingannya dengan tahun sebelumnya ditampilkan pada tabel berikut ini :

Tabel 29. Jumlah Perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan

Keterangan	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah Perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan	0	0	0	0	0
Jumlah Perkara yang diajukan diselesaikan diluar gedung pengadilan	0	0	0	0	0

Tabel 30. Realisasi dan Capaian Kinerja Perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan

Indikator Kinerja	Realisasi (%)					Target 2022 (%)	Capaian (%)
	2018	2019	2020	2021	2022		
Persentase Perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan.	0	0	0	0	0	100	0

Berdasarkan data-data tersebut maka realisasi indikator kinerja pada tahun 2022 adalah melebihi dari apa yang ditargetkan dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Perkara yg diselesaikan diluar gedung pengadilan}}{\text{Jumlah Perkara yg seharusnya diselesaikan diluar gedung pengadilan}} \times 100 \%$$

$$\text{Realisasi} = \frac{0}{0} \times 100 \% = 0\%$$

Dari hasil perhitungan diatas terlihat bahwa kinerja Pengadilan Negeri Parigi terkait dengan pelaksanaan sidang keliling di tahun 2022 telah maksimal

dilakukan, hal ini tidak luput dari kerja sama dan koordinasi yang baik dari seluruh *stakeholders* terkait. Namun diharapkan kedepannya dapat terus ditingkatkan.

Capaian diperoleh dengan membandingkan antara realisasi dan target, dimana pada tahun 2022 capaian untuk indikator kinerja ini adalah sebesar 100 %.

$$\text{Capaian} = \frac{100\%}{100\%} \times 100\% = 100\%$$

c. Indikator Kinerja 3.c : Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (POSBAKUM)

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara jumlah pencari kadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum dengan jumlah permohonan layanan hukum, difungsikan sebagai berikut :

$$\frac{\sum \text{Pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan Bantuan hukum}}{\sum \text{permohonan layanan hukum}} \times 100\%$$

Target indikator kinerja ini pada tahun 2022, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2022 adalah sebesar 100 %. Realisasi dan capaian indikator kinerja **“Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (POSBAKUM)”** pada tahun 2022 serta perbandingannya dengan tahun sebelumnya ditampilkan pada tabel berikut ini :

Tabel 31. Perbandingan Jumlah Pencari Keadilan yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum

Keterangan	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah pencari kadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum	24	53	81	79	83
Jumlah permohonan layanan hukum	24	53	81	79	83

Tabel 32. Target dan Capaian Pencari Keadilan yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum 2022

Indikator Kinerja	Realisasi (%)					Target 2022 (%)	Capaian (%)
	2018	2019	2020	2021	2022		
Persentase Pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum.	100	100	100	100	100	100	100

Berdasarkan data-data tersebut maka realisasi indikator kinerja ini pada tahun 2022 adalah sebesar 100 % dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Pencari Kadilan Golongan Tertentu Yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum}}{\text{Jumlah permohonan layanan hukum}} \times 100 \%$$

$$\begin{aligned} \text{Realisasi} &= \frac{83}{83} \times 100 \% \\ &= 100 \% \end{aligned}$$

Capaian diperoleh dengan membandingkan antara realisasi dan target, dimana pada tahun 2022 capaian untuk indikator kinerja ini adalah sebesar 100 %.

$$\begin{aligned} \text{Capaian} &= \frac{100 \%}{100 \%} \times 100 \% \\ &= 100 \% \end{aligned}$$

Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum) yang ditargetkan 100 % pada tahun 2022, dapat tercapai 100%. Hal ini Menunjukkan bahwa jumlah masyarakat yang memanfaatkan Posbakum Pengadilan Negeri Parigi dari tahun sebelumnya relative stabil dan terhadap jumlah masyarakat yang terbantu dan menerima layanan hukum. Pencapaian ini akan terus ditingkatkan ditahun yang akan datang.

➤ **Sasaran Strategis IV : Meningkatkan Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan**

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran **“Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan”** meliputi 1 (satu) indikator kinerja yang diwujudkan melalui pelaksanaan program peningkatan manajemen peradilan umum.

Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran ini pada tahun 2022 ditampilkan pada tabel berikut ini :

Tabel 33. Realisasi dan Capaian Sasaran Strategis IV

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA	TARGET 2022	REALISASI 2022	CAPAIAN 2022
NO	KINERJA UTAMA				
4	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata Yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	95%	100%	97,5%
Rata-rata capaian kinerja pada Sasaran Strategis IV					97,5 %

Tabel 34. Perbandingan Capaian Sasaran Strategis IV

INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2022	CAPAIAN 2021	CAPAIAN 2020	CAPAIAN 2019	CAPAIAN 2018
Persentase Putusan Perkara Perdata Yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	97,5%	100%	0%	17,53%	4,38%
Rata-rata capaian Kinerja pada sasaran Startegis IV	97,5%	100%	0%	17,53%	4,38%

Analisa terhadap pencapaian masing-masing target indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :

a. Indikator Kinerja : Persentase Putusan Perkara Perdata Yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara jumlah putusan perkara yang ditindaklanjuti dengan jumlah putusan perkara yang sudah BHT, difungsikan sebagai berikut :

$$\frac{\text{umlah Eksekusi yang telah selesai dilaksanakan}}{\text{Jumlah Permohonan Eksekusi}} \times 100 \%$$

Target indikator kinerja ini pada tahun 2022, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2022 adalah sebesar 95 %. Realisasi dan capaian indikator kinerja **“Persentase Putusan Perkara Perdata Yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)”** pada tahun 2022 serta perbandingannya dengan tahun sebelumnya ditampilkan pada tabel berikut ini :

Tabel 35. Perbandingan Realisasi Rasio Putusan Perkara yang ditindaklanjuti

Tahun	Perkara Perdata BHT	Putusan perkara yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	Realisasi Rasio putusan perkara yang ditindaklanjuti (%)
2022	2	2	100
2021	9	3	33,33
2020	53	0	0
2019	95	5	5,26
2018	114	5	4,38

Tabel 36. Perbandingan Realisasi dan Capaian Perkara yang Ditindaklanjuti

Indikator Kinerja	Realisasi (%)					Target 2022 (%)	Capaian (%)
	2018	2019	2020	2021	2022		
Persentase putusan perkara yang ditindaklanjuti	4,38	5,26	0	33,33	100	95	97,5

Berdasarkan data-data tersebut maka realisasi indikator kinerja ini pada tahun 2022 adalah sebesar 100 % dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 \text{Realisasi} &= \frac{\text{Jumlah Putusan Perkara Yang Ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Putusan Perkara Yang Sudah BHT}} \times 100 \% \\
 &= \frac{2}{2} \times 100 \% \\
 &= 100\%
 \end{aligned}$$

Capaian diperoleh dengan membandingkan antara realisasi dan target, dimana pada tahun 2022 capaian untuk indikator kinerja ini adalah sebesar 97,5%.

$$\begin{aligned}
 \text{Capaian} &= \frac{100\%}{95 \%} \times 100 \% \\
 &= 97,5 \%
 \end{aligned}$$

Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi), yang ditargetkan 95 % pada tahun 2022 dapat terlaksana. Capaian ini dikarenakan para pihak dengan sukarela melaksanakan isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (BHT). Kedepannya yang telah menjadi perencanaan kegiatan yang prioritas untuk dilaksanakan di tahun berikutnya adalah dengan melakukan penyesuaian biaya eksekusi sehingga diharapkan masyarakat dapat mengajukan permohonan dengan biaya ringan. Sehingga kepatuhan terhadap putusan pengadilan lebih meningkat.

➤ **Sasaran Strategis V : Peningkatan Kualitas Pengawasan**

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran “**Peningkatan Kualitas Pengawasan**” meliputi 2 (dua) indikator kinerja yang diwujudkan melalui pelaksanaan Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Lainnya.

Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran ini pada tahun 2022 serta perbandingannya dengan tahun sebelumnya ditampilkan pada tabel berikut ini :

Tabel 37. Realisasi dan Capaian Sasaran Strategis V

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA	TARGET 2022	REALISASI 2022	CAPAIAN 2022
NO	KINERJA UTAMA				
5	Peningkatan Kualitas Pengawasan	a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%
		b. Persentase temuan hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti Pengadilan	100%	100%	100%
Rata-rata capaian kinerja pada Sasaran Strategis V					100%

Tabel 38. Perbandingan Capaian Sasaran Strategis V

INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2022	CAPAIAN 2021	CAPAIAN 2020	CAPAIAN 2019	CAPAIAN 2018
a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%
b. Persentase temuan hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti Pengadilan	100%	100%	100%	100%	100%
Rata-rata capaian kinerja pada sasaran strategis V	100%	100%	100%	100%	100%

Analisa terhadap pencapaian masing-masing target indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :

a. Indikator Kinerja 5.a : Persentase Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti.

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara jumlah pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti dengan jumlah pengaduan masyarakat, difungsikan sebagai berikut :

$$\frac{\Sigma \text{ Pengaduan Masyarakat yg Ditindaklanjuti}}{\Sigma \text{ Pengaduan Masyarakat}} \times 100 \%$$

Target indikator kinerja ini pada tahun 2022, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2022 adalah sebesar 100 %. Realisasi dan capaian indikator kinerja "*Persentase Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti*" pada tahun 2022 serta perbandingannya dengan tahun sebelumnya ditampilkan pada tabel berikut ini :

Tabel 39. Perbandingan Jumlah Pengaduan yang Ditindaklanjuti

Keterangan	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah Pengaduan yang ditindaklanjuti	2	-	-	-	-
Jumlah pengaduan masyarakat	2	-	-	-	-

Pada tahun 2022 pengaduan masyarakat yang diajukan pada Pengadilan Negeri Parigi nihil. Diharapkan ditahun yang akan datang aparaturnya Pengadilan Negeri Parigi terus menjaga integritas dan memperbaiki kualitas pelayanan kepada masyarakat, sehingga masyarakat tingkat kepuasan masyarakat pengguna layanan meningkat dan tidak ada pengaduan yang masuk pada Pengadilan Negeri Parigi.

b. Indikator Kinerja 5.b : Persentase Temuan Hasil Pemeriksaan yang ditindaklanjuti.

Indikator Kinerja persentase temuan yang ditindaklanjuti yang ditargetkan 100% pada tahun 2022 ini telah tercapai 100%. Pada tahun 2022 pengawasan internal yang dilakukan di Pengadilan Negeri Parigi adalah sebagai berikut :

✓ Jumlah Pengawasan oleh Hakim Pengawas Bidang :

Selama tahun 2022 Hakim Pengawas Bidang Pengadilan Negeri Parigi telah mengadakan pemeriksaan terhadap seluruh proses administrasi perkara maupun administrasi umum sebanyak 12 (dua belas) kali dan telah menyampaikan laporan hasil pengawasannya untuk ditindaklanjuti.

- ✓ Jumlah Pengawasan oleh Hakim Tinggi Pengawas PT Sulawesi Tengah :
Pada tahun 2022 Hakim Tinggi Pengawas Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah telah mengadakan pemeriksaan terhadap seluruh proses administrasi perkara maupun administrasi umum sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada bulan Maret dan September 2022 dan telah menyampaikan laporan hasil pengawasannya untuk ditindaklanjuti. Adapun laporan tindaklanjut hasil pengawasan telah dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah
- ✓ Ditahun 2022 dilakukan pula kegiatan Surveillance Akreditasi Penjaminan Mutu oleh Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah dibulan September 2022, dan seluruh hasil temuan telah ditindaklanjuti dan dilaporkan dalam bentuk laporan tindaklanjut ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah.

Dari data di atas dapat dijelaskan bahwa untuk tahun 2022 pada Pengadilan Negeri Parigi terdapat 2 (dua) laporan hasil pengawasan dari pengawasan internal dan seluruh laporan tersebut sudah ditindaklanjuti sebagaimana mestinya oleh Pengadilan Negeri Parigi.

➤ **Sasaran Strategis VI : Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia**

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran **“Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia”** meliputi 1 (satu) indikator kinerja yang diwujudkan melalui pelaksanaan program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya.

Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran ini pada tahun 2022 ditampilkan pada tabel berikut ini :

Tabel 40. Realisasi dan Capaian Sasaran Strategis VI

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA	TARGET 2022	REALISASI 2022	CAPAIAN 2022
NO	KINERJA UTAMA				
6	Peningkatan Kualitas SDM	Persentase Pegawai yang lulus diklat teknis yudisial dan non yudisial	100%	100%	100%
Rata-rata capaian kinerja pada Sasaran Strategis VI					100%

Tabel 41. Perbandingan Capaian Sasaran Strategis VI

INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2022	CAPAIAN 2021	CAPAIAN 2020	CAPAIAN 2019	CAPAIAN 2018
Persentase Pegawai yang lulus diklat teknis yudisial dan non yudisial	100%	100%	100%	100%	100%
<i>Rata-rata capaian kinerja pada sasaran strategis VI</i>	100%	100%	100%	100%	100%

Analisa terhadap pencapaian masing-masing target indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :

a. Indikator Kinerja : Persentase Pegawai yang Lulus Diklat Teknis Yudisial Dan Non Yudisial

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara jumlah pegawai yang mengikuti diklat dengan jumlah pegawai yang lulus diklat, difungsikan sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah Pegawai yang lulus diklat}}{\text{Jumlah mengikuti diklat}} \times 100 \%$$

Target indikator kinerja ini pada tahun 2022, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2022 adalah sebesar 100 %. Realisasi dan capaian indikator kinerja "**Persentase Persentase Pegawai yang Lulus Diklat Teknis Yudisial Dan Non Yudisial**" pada tahun 2022 serta perbandingannya dengan tahun sebelumnya ditampilkan pada tabel berikut ini :

Tabel 42. Jumlah Pegawai yang Lulus Diklat

Keterangan	2018	2019	2020	2021	2022
Pegawai yang lulus diklat teknis yudisial dan non yudisial	2	2	3	7	16
Pegawai yang mengikuti diklat teknis yudisial dan non yudisial	2	2	3	7	16

Berdasarkan data-data tersebut maka realisasi indikator kinerja ini pada tahun 2022 adalah sebesar 100 % dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Pegawai yang lulus diklat}}{\text{Jumlah mengikuti diklat}} \times 100 \%$$

$$\begin{aligned} \text{Realisasi} &= \frac{16}{16} \times 100 \% \\ &= 100 \% \end{aligned}$$

Capaian diperoleh dengan membandingkan antara realisasi dan target, dimana pada tahun 2022 capaian untuk indikator kinerja ini adalah sebesar 100%.

$$\begin{aligned} \text{Capaian} &= \frac{100 \%}{100 \%} \times 100 \% \\ &= 100 \% \end{aligned}$$

Pencapaian indikator ini diharapkan mampu menambah kapasitas dan kualitas sumber daya manusia yang ada pada Pengadilan Negeri Parigi sehingga mampu memberikan kontribusi kinerja yang baik. Diharapkan pula ditahun yang akan datang jumlah pegawai yang mengikuti diklat teknis maupun non teknis semakin bertambah.

➤ **Sasaran Strategis VII : Peningkatan Penyediaan Sarana dan Prasarana**

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran **“Peningkatan Penyediaan Sarana dan Prasarana”** meliputi 1 (satu) indikator kinerja yang diwujudkan melalui pelaksanaan Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung.

Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran ini pada tahun 2022 ditampilkan pada tabel berikut ini :

Tabel 43. Realisasi dan Capaian Sasaran Strategis VII

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA	TARGET 2022	REALISASI 2022	CAPAIAN 2022
NO	KINERJA UTAMA				
7	Peningkatan Sarana dan Prasarana	Persentase Realisasi Anggaran Pengadaan Sarana dan Prasarana	97%	99,4%	102,47%
Rata-rata capaian kinerja pada Sasaran Strategis VII					100%

Tabel 44. Perbandingan Capaian Sasaran Strategis VII

INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2022	CAPAIAN 2021	CAPAIAN 2020	CAPAIAN 2019	CAPAIAN 2018
Persentase Realisasi Anggaran Pengadaan Sarana dan Prasarana	99,4%	100%	100%	100%	100%
Rata-rata capaian kinerja pada Sasaran Strategis VII	100%	100%	100%	100%	100%

Analisa terhadap pencapaian masing-masing target indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :

a. Indikator Kinerja : Persentase Realisasi Anggaran Pengadaan Sarana dan Prasarana

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara jumlah realisasi anggaran dengan jumlah pagu anggaran, difungsikan sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah Realisasi Anggaran}}{\text{Jumlah Pagu Anggaran}} \times 100 \%$$

Target indikator kinerja ini pada tahun 2022, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2022 adalah sebesar 97 %. Realisasi dan capaian indikator kinerja “*Persentase Realisasi Pengadaan Sarana dan Prasarana*” pada tahun 2022 serta perbandingannya dengan tahun sebelumnya ditampilkan pada tabel berikut ini :

Tabel 45. Perbandingan Realisasi Anggaran

Tahun	Pagu Anggaran Belanja Modal	Realisasi Anggaran Belanja Modal	Persentase realisasi anggaran (%)
2022	505.773.000	505.450.000	99,4
2021	137.500.000	137.500.000	100
2020	3.564.300.000	3.564.300.000	100
2019	39.000.000	39.000.000	100
2018	39.000.000	39.000.000	100

Tabel 46. Perbandingan Realisasi, Target dan Capaian Realisasi Anggaran Tahun 2021

Indikator Kinerja	Realisasi (%)					Target 2022 (%)	Capaian (%)
	2018	2019	2020	2021	2022		
Persentase realisasi anggaran belanja modal pengadaan sarana dan prasarana	100	100	100	100	99,4	97	102,47

Berdasarkan data-data tersebut maka realisasi indikator kinerja ini pada tahun 2022 adalah sebesar 100 % dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Realisasi Anggaran}}{\text{Jumlah Pagu Anggaran}} \times 100 \%$$

$$\text{Realisasi} = \frac{505.450.000}{505.773.000} \times 100 \%$$

$$= 99,4 \%$$

Capaian diperoleh dengan membandingkan antara realisasi dan target, dimana pada tahun 2022 capaian untuk indikator kinerja ini adalah sebesar 103,09%.

$$\text{Capaian} = \frac{99,4 \%}{97\%} \times 100 \%$$

$$= 102,47 \%$$

Pencapaian indikator ini diharapkan mampu menyediakan sarana dan prasarana pendukung yang ada pada Pengadilan Negeri Parigi guna peningkatan pelayanan kepada masyarakat pengguna layanan pengadilan. Diharapkan ditahun-tahun mendatang alokasi belanja modal bisa lebih ditingkatkan dan usulan Pengadilan Negeri Parigi terkait belanja modal bisa segera terpenuhi guna mendukung peningkatan kualitas kinerja dan pelayanan public.

C. REALISASI ANGGARAN

Pada tahun 2022 Pengadilan Negeri Parigi telah menetapkan 3 (tiga) program kegiatan untuk Tahun Anggaran 2022 yang seluruhnya berjumlah Rp. 4.945.706.000 (Empat Milyar Sembilan Ratus Empat Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Enam Ribu Rupiah) yang terdiri dari dua DIPA yaitu Rp. 4.866.922.000 (Empat Milyar Delapan Ratus Enam Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Dua Ribu Rupiah) untuk Dipa Nomor 005-01.2.672980/2022 serta Rp. 78.784.000 (Tujuh Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Rupiah) dari Dipa Nomor 005-03.2.672981/2022, adapun program yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- a. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung RI.
- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Peradilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama.
- c. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Pencapaian kinerja dari sisi penyerapan anggaran Pengadilan Negeri Parigi Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

- Realisasi belanja Negara pada TA 2022 untuk DIPA 01 adalah sebesar Rp 4.803.010.913 atau mencapai 98,68 % dari total alokasi anggaran sebesar Rp 4.866.922.000.
- Realisasi belanja Negara pada TA 2022 untuk DIPA 03 adalah sebesar Rp.77.867.820, atau mencapai 98,84 % dari total alokasi anggaran sebesar Rp. 78.784.000

Rincian penyerapan Anggaran per program pada DIPA Pengadilan Negeri Parigi Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 47. Realisasi Anggaran Per Program Tahun 2022

NO	PROGRAM	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1.	DIPA 01 BADAN URUSAN ADMINISTRASI (BUA)			
	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	4.361.149.000	4.300.660.913	98,61
	Pengadaan Sarana dan Prasarana dilingkungan Mahkamah Agung	505.773.000	505.450.000	99,4
2.	DIPA 03 DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM (BADILUM)			
	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	78.784.000	77.867.820	98,84

Rincian perbandingan penyerapan anggaran Pengadilan Negeri Parigi Tahun 2018, 2019, 2020,2021 dan tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 48. Perbandingan Realisasi Anggaran DIPA 01,03

Tahun	DIPA	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase realisasi anggaran (%)
2022	DIPA 01	4.866.922.000	4.803.010.913	98,68
	DIPA 03	78.784.000	77.867.820	98,84
2021	DIPA 01	4.205.280.000	4.135.117.410	98,33
	DIPA 03	78.784.000	77.159.500	97,93
2020	DIPA 01	3.793.502.000	3.769.462.253	99,36
	DIPA 03	87.440.000	87.287.550	99,82
2019	DIPA 01	3.822.035.000	3.821.722.125	99,99
	DIPA 03	110.405.000	108.655.250	98,41
2018	DIPA 01	3.927.018.000	3.907.373.265	99,49
	DIPA 03	77.795.000	68.278.425	87,76

Dari tabel di atas dapat terlihat bahwa secara umum realisasi penyerapan anggaran untuk masing-masing Program/kegiatan pada DIPA Pengadilan Negeri Parigi Tahun 2022 sangat baik dimana rata-rata mencapai 98%. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja Pengadilan Negeri Parigi dari sisi penyerapan anggaran sangat baik dan disiplinnya pelaksanaan kegiatan, atau konsistensi pelaksanaan kegiatan dengan rencana pelaksanaan kegiatan yang telah disusun, sehingga banyak target-target pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang dapat direalisasikan.

Komposisi penggunaan anggaran pada masing-masing program/kegiatan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Negeri Parigi, baik DIPA 01 Badan Urusan Administrasi dan DIPA 03 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum terkait realisasinya dalam mewujudkan capaian sasaran strategis/ Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Parigi adalah sebagai berikut :

1. **Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum**, dengan pagu anggaran Rp. 78.784.000,-(Tujuh Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Rupiah) merupakan program untuk mencapai sasaran strategis terwujudnya proses peradilan yang pasti transparan dan akuntabel, peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara dan peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan. Rincian kegiatan yang dilaksanakan beserta realisasi penggunaan anggaran untuk pencapaian sasaran strategis di atas adalah sebagai berikut :

**Tabel 49. Realisasi Anggaran Tahun 2022
Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum**

NO	PROGRAM / KEGIATAN	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	%
	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum			
1.	Layanan pos bantuan hukum	19.200.000	19.200.000	100
2.	Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan melalui sidang diluar gedung pengadilan			
3.	Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan ditingkat pertama dan banding yang tepat waktu	59.584.000	58.667.820	98,46

2. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung

Dengan total pagu anggaran sebesar Rp. 4.866.922.000 (Empat Milyar delapan ratus enam puluh enam juta Sembilan ratus dua puluh dua Ribu Rupiah) merupakan program untuk mencapai sasaran strategis Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), dan Peningkatan kualitas pengawasan. Rincian kegiatan yang dilaksanakan beserta realisasi penggunaan anggaran untuk pencapaian sasaran strategis di atas adalah sebagai berikut :

Tabel 50.
Realisasi Anggaran Tahun 2022 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung

NO	PROGRAM / KEGIATAN	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	%
	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung			
1.	Layanan Perkantoran			
	- Gaji dan Tunjangan	2.894.891.000	2.868.759.797	99,10
	- Operasional pemeliharaan kantor	1.463.158.000	1.428.801.116	97,65

3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung, dengan pagu anggaran Rp. 505.773.000,- (Lima ratus lima juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu Rupiah) merupakan program untuk mencapai **sasaran strategis Peningkatan penyediaan sarana dan prasarana.** Rincian kegiatan yang dilaksanakan beserta realisasi penggunaan anggaran untuk pencapaian sasaran strategis di atas adalah:

Tabel 51. Realisasi Anggaran Tahun 2021
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

NO	PROGRAM / KEGIATAN	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	%
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung			
1.	Pengadaan Perangkat Pengolah Data Dan Komunikasi	505.773.000	505.450.000	99.4

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Pengadilan Negeri Kelas II Parigi Tahun 2022 ini merupakan salah satu bentuk pertanggung jawaban pelaksanaan anggaran dan kegiatan tahun 2022 dan sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistim Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Secara umum tujuan, sasaran, program dan sebagian besar kegiatan yang dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Parigi Kelas II tahun 2022 dapat dilaksanakan dengan baik, namun demikian ada beberapa sasaran yang capaiannya belum optimal dan masih perlu terus ditingkatkan guna merespon tuntutan pelayanan masyarakat yang semakin tinggi dan untuk memperbaiki citra peradilan di mata masyarakat.

Pengawasan internal pada Pengadilan Negeri Parigi Kelas II juga telah diupayakan demi menjamin tertib administrasi baik administrasi perkara maupun administrasi umum melalui penyampaian laporan tertulis dan lisan dalam rapat rutin yang dilaksanakan setiap bulan yang dipimpin langsung oleh Ketua Pengadilan Negeri Parigi Kelas II. Selain itu untuk memperketat pengawasan internal, telah ditunjuk hakim-hakim pegawai bidang sehingga kualitas administrasi peradilan dan administrasi umum pada Pengadilan Negeri Parigi Kelas II telah diupayakan untuk berjalan semaksimal mungkin, walaupun masih terdapat kekurangan, diantaranya diakibatkan karena keterbatasan sumber daya manusia sementara volume perkara yang ditangani pada Pengadilan Negeri Parigi yang cukup tinggi.

Laporan Kinerja ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang capaian kinerja pada berbagai sasaran strategis dan indikator kinerja utama Pengadilan Negeri Parigi dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Hasil dari evaluasi pencapaian kinerja dalam laporan ini merupakan bahan pembelajaran yang baik bagi Pengadilan Negeri Parigi untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pada masa yang akan datang. Untuk itu ke depan, dengan memperhatikan evaluasi tersebut Pengadilan Negeri Parigi akan mengupayakan langkah-langkah perbaikan secara konkrit dalam rangka meningkatkan kinerja organisasi.

Perbaikan tersebut antara lain :

- Penguatan organisasi melalui penyelarasan uraian tugas, penyusunan dan penerapan SOP.

- Peningkatan kelembagaan, tata laksana, dan SDM aparatur Pengadilan Negeri Parigi yang professional, serta akuntabilitas satuan kerja melalui perbaikan manajemen internal khususnya dalam pengelolaan perencanaan dan penganggaran.
- Peningkatan sarana, prasarana dan kualitas lingkungan kerja.

B. REKOMENDASI

1. Perlunya optimalisasi pencapaian kinerja kegiatan pada pengelolaan sumber daya manusia (SDM), yang salah satunya dilakukan dengan perencanaan yang baik.
2. Upaya-upaya peningkatan kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi peradilan oleh Pengadilan Negeri Parigi dapat dilakukan antara lain melalui:
 - ✓ Perencanaan program dan kegiatan secara mantap serta antisipatif agar terhindar dari permasalahan-permasalahan dalam pelaksanaannya.
 - ✓ Penguatan pengawasan internal dan eksternal;
 - ✓ Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) terkait dengan teknis maupun non teknis yudisial, terutama kemampuan dalam penggunaan teknologi informasi (TI);
 - ✓ Meningkatkan koordinasi dan kerjasama secara keseluruhan oleh segenap stakeholder komponen aparatur peradilan, para penegak hukum, pemerintah daerah dan masyarakat komponen terkait dari pengadilan;
 - ✓ Perencanaan kinerja dan anggaran dilakukan dengan cermat dan transparan, demikian juga revisi anggaran dan kegiatan dilakukan dengan sangat selektif sehingga tidak menghambat pelaksanaan kegiatan.
 - ✓ Peningkatan dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia (SDM) dilakukan lebih intensif melalui pengadaan calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)/Pegawai Negeri Sipil (PNS), pembinaan, pendidikan dan pelatihan.
 - ✓ Pemenuhan terhadap sarana dan prasarana operasional perkantoran harus diprioritaskan, untuk itu perlu adanya monitoring dan evaluasi terhadap realisasi pemenuhan kebutuhan yang baik terhadap sarana dan prasarana penunjang yang pemenuhannya dilakukan secara bertahap sesuai dengan anggaran yang tersedia.